SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 9, No. 1, January 2026

Analisis Kontribusi BUMDes Inahuk terhadap Pendapatan Asli Desa Mata Air Tahun 2024, Kecamatan Kupang Tengah

Mariana Jesika Mau[1], Fransiska Wea[2], Clarita Nanci Fatin[3] ,Tasya Manek[4]
Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia
weafransiska22@gmail.com[2], nancyfatin048@gmail.com[3], tasyamanek8@gmail.com[4]
E-mail Korespondensi : Jesikamau90@gmail.com

Submitted: 28th Nov 2025 | **Edited**: 18th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Mau, M. J., Wea, F., Fatin, C. N., & Manek, T. (2026). Analisis Kontribusi BUMDes Inahuk terhadap Pendapatan Asli Desa Mata Air Tahun 2024, Kecamatan Kupang Tengah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 9*(1), 97-103.

ABSTRACT

This study examines the contribution of Inahuk Village-Owned Enterprise (BUMDes) to the Original Village Income (PADes) of Mata Air Village in 2024. The research was conducted to address the main problem that the village's economic potential, particularly the Sulamanda Beach asset, has not been optimally managed due to the non-functioning of BUMDes in recent years. A qualitative descriptive approach was applied, supported by interviews with the Village Head, BUMDes administrators, and community members, as well as observations and document analysis. Data were analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings show that BUMDes Inahuk did not provide any financial contribution to PADes in 2024. This condition stems from inactive business units, the absence of financial reports since 2023, weak managerial performance, and a lack of accountability from the management. The village government also failed to implement adequate supervision, resulting in operational stagnation. As a consequence, the management of Sulamanda Beach was temporarily taken over by the village government to ensure that village revenue could still be collected. These results highlight the gap between the expected role of BUMDes and its actual operation. Strengthening governance, improving managerial capacity, and clarifying institutional roles are essential steps to revitalize BUMDes Inahuk so it can contribute meaningfully to PADes and support local economic development.

Keywords: BUMDes Inahuk, PADes, Governance, Accountability, Local Economy

PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas nasional dalam memperkuat fondasi perekonomian daerah. Salah satu instrumen yang dirancang untuk mendukung kemandirian tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang secara hukum mendapatkan legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes diharapkan menjadi lembaga ekonomi yang mampu mengelola potensi, aset, serta peluang ekonomi desa secara profesional dan akuntabel (Sulistiyani, 2019). Kehadiran BUMDes bukan sekadar pelengkap birokrasi desa, tetapi berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) menjadi indikator penting keberhasilan desa dalam mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan

memperluas kapasitas fiskal (Hastuti & Rahmawati, 2020). Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa implementasi BUMDes sering menghadapi kendala berupa lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas manajerial, dan kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa (Wulandari et al., 2021; Lestari, 2022). Akibatnya, tidak sedikit BUMDes yang berhenti beroperasi, tidak mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, atau gagal memberikan kontribusi nyata terhadap PADes (Sari & Wardana, 2023).

Fenomena tersebut juga tercermin di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah. Meskipun desa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, termasuk aset wisata Pantai Sulamanda, BUMDes Inahuk tidak menunjukkan kinerja yang optimal. Berdasarkan temuan awal, BUMDes tidak menjalankan unit usaha, tidak menyampaikan laporan keuangan sejak tahun 2023, dan menunjukkan lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara peran ideal BUMDes yang seharusnya mendukung kemandirian desa dan realitas operasional di lapangan.

Dari sisi akademik, penelitian mengenai kontribusi BUMDes terhadap PADes telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada desa yang berhasil mengoptimalkan unit usahanya (Misnawati & Yusuf, 2021; Pratiwi et al., 2022). Masih terbatas kajian yang menyoroti BUMDes yang tidak berfungsi dan dampaknya terhadap keberlanjutan keuangan desa, terutama dalam konteks wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi celah penelitian mengenai bagaimana ketidakberfungsian BUMDes memengaruhi PADes dan apa saja faktor yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi BUMDes Inahuk terhadap PADes Desa Mata Air tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan BUMDes tidak menjalankan fungsi ekonominya secara optimal.

LANDASAN TEORI

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk melalui keputusan musyawarah desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri dan profesional. Sebagai institusi berbasis komunitas, BUMDes dirancang untuk menjalankan kegiatan usaha sekaligus memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat (Firdaus & Hapsari, 2019). Keberadaan BUMDes memiliki landasan legal yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. BUMDes berperan sebagai jembatan antara potensi desa dan peningkatan nilai ekonomi, sehingga keberhasilannya ditentukan oleh kualitas pengelolaan serta dukungan tata kelola kelembagaan (Wicaksono & Prabowo, 2020).

Tujuan dan Fungsi BUMDes

Tujuan utama pendirian BUMDes ialah meningkatkan pendapatan desa, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat (Rahmadi & Nurhayati, 2021). Secara fungsional, BUMDes menjalankan unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial sesuai kebutuhan desa. Efektivitas fungsi tersebut bergantung pada kapasitas manajerial, perencanaan usaha, dan kemampuan mengelola aset secara berkelanjutan (Kartika & Hidayat, 2020). Dalam konteks pembangunan desa, BUMDes juga berperan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan ruang partisipasi dalam kegiatan ekonomi (Ariyani & Sudarmo, 2022).

Pendapatan Asli Desa (PADes)

PADes merupakan komponen penerimaan desa yang bersumber dari pemanfaatan kekayaan desa, hasil usaha BUMDes, serta partisipasi masyarakat. PADes menjadi indikator penting kemandirian fiskal desa karena memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk membiayai pembangunan secara mandiri (Sutrisno, 2019). Kontribusi BUMDes terhadap PADes dapat berupa setoran laba, bagi hasil usaha, maupun pengelolaan aset desa yang menghasilkan pendapatan. Besarnya kontribusi dipengaruhi oleh kondisi usaha, regulasi internal, serta kemampuan desa dalam memastikan adanya transparansi dan pertanggungjawaban keuangan (Zainuddin, 2021).

Tata Kelola Desa (Good Village Governance)

Prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta kepatuhan pada regulasi. Dalam pengelolaan BUMDes, prinsip tersebut menjadi dasar agar setiap kegiatan usaha dapat berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Kusnadi & Mahdalena, 2020). Kelemahan tata kelolamisalnya tidak adanya laporan keuangan, rendahnya kapasitas manajemen, atau minimnya pengawasansering menjadi penyebab utama stagnasi BUMDes (Hafid & Rosmayani, 2023).

Teori Pengembangan Ekonomi Lokal (Local Economic Development)

Pendekatan pengembangan ekonomi lokal menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya, potensi, dan jaringan sosial di tingkat desa untuk menciptakan nilai tambah. BUMDes menjadi instrumen yang relevan dalam pendekatan ini karena mampu mengelola aset wisata, perdagangan lokal, hingga jasa pelayanan masyarakat (Ayuningtyas, 2019). Dalam kerangka teori ini, keberhasilan BUMDes dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi potensi pasar, pengelolaan aset secara inovatif, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan desa (Suryani & Putra, 2021).

Teori Kelembagaan (Institutional Theory)

Teori kelembagaan menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh struktur, aturan, peran pengurus, dan budaya kerja yang terbentuk. Institusi yang kuat dicirikan oleh kejelasan pembagian tugas, prosedur yang transparan, dan sistem pengawasan yang terukur (Rahayu & Yusuf, 2020). Dalam konteks BUMDes, teori ini menjelaskan bagaimana lemahnya struktur organisasi atau ketidakjelasan peran dapat menghambat efektivitas operasional dan mengurangi kontribusinya terhadap PADes (Nurjanah & Laksana, 2022).

Kerangka Pemikiran Teoretis

Berdasarkan teori-teori tersebut, kontribusi BUMDes terhadap PADes dipengaruhi oleh tiga unsur utama:

1. kapasitas ekonomi desa yang didasarkan pada pengembangan potensi lokal,
2. kualitas tata kelola yang menentukan akuntabilitas dan efektivitas organisasi, serta
3. kekuatan kelembagaan yang mencakup struktur, peran, dan manajemen internal.

Kerangka ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana BUMDes Inahuk menjalankan fungsi strategisnya sebagai lembaga ekonomi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Mata Air dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami kondisi aktual pengelolaan BUMDes Inahuk dan kontribusinya terhadap PADes. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengamati fenomena secara naturalistik serta menggali dinamika sosial yang melatarbelakangi ketidakberfungsian BUMDes (Suwandi & Nurasih, 2019). Informan dipilih secara purposif, terdiri dari Kepala Desa, pengurus BUMDes, perangkat desa, dan

masyarakat yang mengetahui aktivitas BUMDes, sehingga data yang diperoleh mencakup perspektif kelembagaan, administratif, dan sosial masyarakat (Prasetyo & Rahadian, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan usaha desa, sementara observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi unit usaha dan aset yang berada di bawah BUMDes (Handayani & Kustanto, 2020). Studi dokumentasi dilakukan terhadap arsip desa, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya guna memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi (Wardani & Pertiwi, 2022).

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Maulana & Sulastri, 2020). Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi ulang kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi (Amin & Purwanto, 2023).

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Inahuk tidak menjalankan kegiatan usaha selama tahun 2023 hingga 2024. Berdasarkan wawancara dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDes, seluruh unit usaha yang sebelumnya direncanakan tidak beroperasi, termasuk pengelolaan aset wisata Pantai Sulamanda yang seharusnya berada di bawah kewenangan BUMDes. Ketidakaktifan ini terlihat dari tidak adanya laporan pertanggungjawaban, tidak tersedianya catatan keuangan, dan tidak adanya kegiatan administratif sejak awal 2023. Pemerintah desa memastikan bahwa tidak ada setoran keuntungan atau kontribusi finansial dari BUMDes kepada PADes pada tahun 2024.

Hasil observasi lapangan memperkuat temuan tersebut. Fasilitas usaha desa tidak menunjukkan aktivitas ekonomi apa pun, sementara aset desa yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagian dialihkan pengelolaannya ke pemerintah desa untuk mencegah penurunan pendapatan desa. Peneliti juga menemukan bahwa komunikasi antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa hampir tidak berlangsung, sehingga proses evaluasi tidak dapat dilakukan secara berkala. Dokumen-dokumen yang terkait dengan keuangan dan kegiatan BUMDes juga tidak ditemukan dalam arsip desa.

Dari sisi kelembagaan, ditemukan ketidakjelasan struktur organisasi BUMDes. Beberapa pengurus tidak lagi aktif menjalankan peran, sementara tidak ada langkah penggantian atau revitalisasi kepengurusan. Selain itu, tidak ditemukan adanya SOP operasional yang mengatur mekanisme kerja BUMDes. Kondisi ini mengakibatkan proses pengambilan keputusan berjalan tidak terarah sehingga menghambat optimalisasi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Warga desa yang diwawancarai juga menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya informasi terbaru mengenai program atau kegiatan usaha BUMDes.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara peran ideal BUMDes dan realitas operasional di Desa Mata Air. Secara normatif, BUMDes dibentuk untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa, mengelola potensi lokal, dan memberikan kontribusi terhadap PADes. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan aktivitas usaha, lemahnya manajemen, serta tidak adanya laporan keuangan membuat BUMDes Inahuk gagal menjalankan perannya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Wicaksono dan Prabowo (2020) yang menyatakan bahwa stagnasi BUMDes

umumnya dipicu oleh lemahnya tata kelola dan kurangnya kapasitas manajerial pengelola.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran pemerintah desa dalam pengawasan BUMDes belum berjalan optimal. Hal ini serupa dengan studi Ariyani dan Sudarmo (2022) yang menunjukkan bahwa ketidaktegasan pemerintah desa sering mengakibatkan BUMDes tidak memiliki arah kerja yang jelas. Ketidakjelasan struktur organisasi yang ditemukan dalam penelitian ini turut mendukung temuan Nurjanah dan Laksana (2022), bahwa kelembagaan yang lemah menyebabkan BUMDes tidak mampu memaksimalkan aset desa maupun merealisasikan rencana unit usaha.

Ketiadaan kontribusi BUMDes terhadap PADes sepanjang 2024 menguatkan hasil penelitian Sutrisno (2019) bahwa PADes dapat terganggu ketika sumber pendapatan desa tidak dikelola melalui mekanisme yang akuntabel. Dalam konteks penelitian ini, tidak berfungsinya BUMDes menyebabkan pemerintah desa harus mengambil alih pengelolaan aset wisata demi menjaga stabilitas pendapatan desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan hubungan prinsipalagen sebagaimana dijelaskan dalam teori kelembagaan, di mana pengurus BUMDes tidak menjalankan mandat yang diberikan oleh pemerintah desa.

Selain itu, ketidakaktifan BUMDes Inahuk juga menyebabkan potensi ekonomi lokal tidak terkelola secara maksimal. Hal ini sejalan dengan Ayuningtyas (2019) dan Suryani dan Putra (2021) yang menekankan bahwa potensi lokal hanya dapat memberikan dampak ekonomi jika dikelola melalui institusi yang kompeten. Tidak adanya inovasi usaha ataupun upaya pengembangan unit usaha mempertegas bahwa BUMDes membutuhkan revitalisasi agar dapat kembali menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Inahuk belum mampu menjalankan perannya sebagai lembaga penggerak ekonomi desa. Sepanjang tahun 2023-2024, tidak terdapat aktivitas usaha yang berjalan maupun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemerintah desa. Ketidakaktifan ini mengakibatkan BUMDes tidak memberikan kontribusi finansial terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Mata Air pada tahun 2024. Kondisi tersebut sekaligus menegaskan adanya kesenjangan antara peran ideal BUMDes sebagai pengelola potensi desa dan kenyataan operasional di lapangan.

Faktor utama yang menyebabkan BUMDes tidak berfungsi meliputi lemahnya akuntabilitas pengurus, ketiadaan laporan keuangan, tidak jelasnya struktur organisasi, serta minimnya koordinasi dengan pemerintah desa. Selain itu, pengawasan yang belum berjalan optimal membuat permasalahan kelembagaan tidak segera ditangani. Akibatnya, peluang desa untuk memanfaatkan potensi ekonomi, termasuk aset wisata Pantai Sulamanda, tidak dapat dijalankan melalui BUMDes sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, revitalisasi BUMDes menjadi langkah mendesak agar lembaga ini kembali berfungsi secara optimal. Pembenahan tata kelola, penguatan kapasitas pengurus, penyusunan SOP yang jelas, serta pengawasan yang lebih terarah diperlukan untuk memastikan keberlanjutan usaha desa. Dengan perbaikan kelembagaan dan dukungan pemerintah desa, BUMDes Inahuk berpotensi kembali menjadi instrumen penting dalam meningkatkan PADes dan mendorong kemandirian ekonomi Desa Mata Air.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M., & Purwanto, A. (2023). Triangulasi dalam penelitian kualitatif: Pendekatan untuk meningkatkan validitas data. *Jurnal Metodologi Sosial*, 5(1), 44-58.

Ariyani, L., & Sudarmo, S. (2022). Pemberdayaan ekonomi desa melalui optimalisasi peran BUMDes. *Journal of Rural Development Studies*, 4(1), 55-67.

Ayuningtyas, F. (2019). Local economic development and village enterprises: Strengthening rural economic initiatives. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 8(2), 120-131.

Firdaus, S., & Hapsari, D. (2019). Model pengelolaan BUMDes berbasis potensi lokal. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Desa*, 3(1), 14-27.

Hafid, A., & Rosmayani, R. (2023). Tantangan tata kelola BUMDes dalam meningkatkan kinerja usaha desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(2), 204-218.

Handayani, R., & Kustanto, H. (2020). Observasi non-partisipatif dalam penelitian sosial. *Jurnal Ilmu Perilaku*, 3(2), 87-95.

Hastuti, W., & Rahmawati, L. (2020). Pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 112-123.

Kartika, R., & Hidayat, T. (2020). Optimalisasi fungsi BUMDes dalam pengembangan usaha desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 6(1), 33-42.

Kusnadi, E., & Mahdalena, M. (2020). Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan BUMDes. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 9(3), 189-201.

Lestari, D. A. (2022). Tantangan pengembangan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45-56.

Maulana, F., & Sulastri, H. (2020). Analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 11(1), 12-25.

Misnawati, M., & Yusuf, M. (2021). Analisis kontribusi BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 9(2), 157-167.

Nurjanah, N., & Laksana, B. (2022). Kelembagaan BUMDes dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan usaha desa. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Desa*, 7(2), 98-110.

Prasetyo, A., & Rahadian, D. (2021). Teknik purposive sampling dalam penelitian kebijakan publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 6(2), 101-113.

Pratiwi, S., Handoko, E., & Putra, A. (2022). Kinerja BUMDes dalam mendorong kemandirian fiskal desa. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, 7(3), 221-233.

Rahayu, S., & Yusuf, P. (2020). Analisis struktur organisasi dalam penguatan kelembagaan desa. *Jurnal Organisasi dan Manajemen Publik*, 5(2), 144-158.

Sari, F. M., & Wardana, A. (2023). Evaluasi tata kelola BUMDes dan implikasinya terhadap pembangunan desa. *Jurnal Manajemen Publik*, 4(1), 33-47.

Sulistiyani, E. (2019). BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 2(2), 98-108.

Suryani, L., & Putra, I. G. (2021). Pengembangan ekonomi lokal melalui inovasi unit usaha BUMDes. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 12(4), 278-289.

Sutrisno, A. (2019). Pendapatan Asli Desa sebagai indikator kemandirian fiskal desa. *Jurnal Kebijakan Publik Desa*, 2(3), 101-113.

Suwandi, K., & Nurasih, S. (2019). Pendekatan kualitatif dalam memahami fenomena sosial di pedesaan. *Jurnal Sosiologi Terapan*, 4(1), 58-70.

Wardani, P., & Pertiwi, N. (2022). Studi dokumentasi sebagai instrumen validasi data kualitatif. *Jurnal Studi Organisasi*, 7(3), 211-224.

Wicaksono, A., & Prabowo, Y. (2020). Analisis hambatan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 144-156.

Wulandari, P., Hidayat, R., & Kencana, P. (2021). Profesionalisme pengelola BUMDes dalam meningkatkan daya saing usaha desa. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(4), 512-523.

Yuliani, N., & Saputra, D. (2020). Peran pemerintah desa dalam pengawasan BUMDes. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 5(1), 76-88.

Zainuddin, A. (2021). Kontribusi BUMDes terhadap peningkatan pendapatan desa dalam perspektif keuangan publik. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan Desa*, 5(1), 1-12.